

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Jakarta: Bina Aksara.

Burght, Gregor Van Der. 1995. *Hukum Waris*. terjemahan oleh F. Tengker.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chazawi, Adami. 2018. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*,

Malang: Media Nusa Creative.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*

Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harahap, M. Yahya. 2018. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*

KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2018. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*

KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.

Herdiansyah, Haris. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta:

Salemba Humanika.

Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.

Yogyakarta: Penerbit Libert.

Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka

Yustisia.

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Presektif*

Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia.

Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press-Universitas Indonesia.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4432);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5491);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6842);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris
(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 545)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021
tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian, Struktural Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran
Majelis Kehormatan Notaris (Berita Negara Tahun 2021 Nomor
212);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:49/PUU-X/2012 tentang
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam Pemberian
Persetujuan Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Suatu Perkara
Hukum;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tentang
Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris
Dalam Pemeriksaan Suatu Perkara Hukum;

Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 93/PID/2017/PT.SMR

Putusan Mahkamah Agung No. 1400/K.PID/2023

C. Jurnal dan Artikel

Adjie, Habib, Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT,
Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Anandiaz Raditya Priandhana, “ Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020), Indonesian Notary Volume 3 Maret 2021.

Bappenas. “Transisi Aparatur Sipil Negara Menuju Ibu Kota Negara Nusantara”. The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, Volume 43, Agustus 2022, hlm 23.

CNN Indonesia "Korban Pelecehan Seksual di KPI Lapor Polisi Tak Digubris" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210901194746-12-688546/korban-pelecehan-seksual-di-kpi-lapor-polisi-tak-digubris>. Diakses pada 10 Februari 2025.

Firmansyah, Irawan Arief dan Sri Endah Wahyuningsih. “Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana” Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3 (September, 2017)

Johari. “Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* ISSN 2302-6219 E-ISSN 27225100 Volume VIII Nomor 2 (November 2020)

Kawengian, Tiovany A. “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHP” *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016

Laurensius Arliman, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

Pancapuri, Azisia, Rahmad Safa'at, dan Istislam. "Perlindungan Hukum

Bagi Notaris dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 (Studi Di Kantor Polisi Resort Kota Malang)" studentjournalub, hlm 3, diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrgMXNKLqNnFQIA2LNXNy_oA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1739957066/RO=10/RU=https%3a%2f%2fhukum.studentjournal.ub.ac.id%2findex.php%2fhukum%2farticle%2fdownload%2f2026%2f1361/RK=2/RS=RydqyFAfJNtswWCWdPER7nhot0s- pada 5 Februari 2025

R.Subekti, Hukum Pembuktian, cetakan ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

Sekarressie Pathria Zhahara, Budi Santoso, Novira Maharani Sukma, "Pelaksanaan Penyidikan Oleh Lembaga Kepolisian Terkait Akta yang Dibuat Notaris di Kota Semarang", Jurnal Notarius, Vol. 13 No.2 Tahun 2020, hlm 1-14. Diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/31306/17552>

Soesanto, R. 1982. Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris, Jakarta: Pradnya Paramita

Tiva Aulia, "Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris sebagai Saksi di Persidangan Pidana", (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan,

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Februari 2020), hlm

1-134.

Diakses

melalui

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23511/179210>

[94.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

Utami, Ria Anggraeni. “Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam

Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadjan Negeri Bengkulu” hlm

59-61 diakses dari <https://repository.unib.ac.id/id/eprint/1091/1/1->

[kute.pdf](#) pada 7 Februari 2025